

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa Tembung, Percut Sei Tuan

Hanna Izzati Ar Raudhah¹, Yona Kristin Simbolon², Julia Ivana³

Email: hannaizzati0302@gmail.com¹, yonakristin0410@gmail.com²,
juliaivanna@unimed.ac.id³

Abstrak: Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Sumaryadi (2005:46). Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu pemerintahan merupakan bentuk menyampaikan pendapat atau pemikiran dari warga negara. Penghargaan terhadap kebebasan berfikir dan berpendapat sejalan dengan bagaimana suatu pemerintahan memperlakukan aspirasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat sering kali merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup pengaruh dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, yang dapat mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu muncul berbagai pertanyaan yang menjadi rumusan tujuan penelitian ini yaitu peneliti ingin melihat bagaimana keadaan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa Tembung, Percut Sei Tuan. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, sumber data sekunder dan primer, pengumpulan data observasi dan wawancara serta teknik analisis data kualitatif. Adapun hasil yang didapatkan bahwa Masyarakat memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan desa, Partisipasi politik masyarakat meningkatkan kualitas pembangunan desa dan mengatasi kekhawatiran politik, Namun, ada hal yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa Tembung, Percut Sei Tuan, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, faktor kepentingan masyarakat, dan faktor sentralisasi perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Partisipasi, Keputusan, Masyarakat, Pemerintah Daerah

Abstract: Participation is the role of a person or community group in the development process either in the form of statements or in the form of activities by providing input such as thoughts, energy, time, expertise and capital. Sumaryadi (2005:46). Participation in decision making in a government is a form of conveying opinions or thoughts from citizens. Respect for freedom of thought and opinion is in line with how a government treats the aspirations of citizens in the decision-making process. Communities often feel that they do not have enough influence in decision-making processes at the regional level, which can reduce their sense of fairness and trust in local government. Therefore, various questions emerged which became the formulation of the aim of this research, namely that the researcher wanted to see the state of community participation in the decision-making process at the Tembung village level, Percut Sei Tuan. Using descriptive qualitative research methods, secondary and primary data sources, observation and interview data collection and qualitative data analysis techniques. The results obtained are that the community has an important role in the decision-making process that has an impact on village development. Community political participation improves the quality of village development and overcomes political concerns. However, there are things that influence community political participation in decision-making in Tembung village, Percut Sei Sir, such as the lack of socialization from the village government, community interest factors, and centralization of village development planning.

Keyword: Participation, Decision, Public, Regional Government

PENDAHULUAN

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Sumaryadi (2005:46). Pengertian ini harusnya melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, karena pada dasarnya tidak lepas daripada partisipasi masyarakat itu sendiri sebagai pengambilan keputusan(Joorie.M.Ruru & Rompas, 2019)

Segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Masyarakatlah yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayahnya, termasuk didalamnya adalah pembangunan di tingkat desa. Selain itu juga, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pelaksana program-program pembangunan harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegelolaan pembangunan (Lukmanul Hakim, S.Ag, 2017)

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu pemerintahan merupakan bentuk menyampaikan pendapat atau pemikiran dari warga negara. Penghargaan terhadap kebebasan berfikir dan berpendapat sejalan dengan bagaimana suatu pemerintahan memperlakukan aspirasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat menggambarkan bagaimana sebuah kekuasaan bertindak dan menampilkan sisi demokratis atau otoriter. Partisipasi dalam pengambilan keputusan politik ini sangat erat dengan ciri demokrasi, dengan terlibat secara langsung dalam menghadiri undangan rapat. Selanjutnya dalam penentuan keputusan dilaksanakan dengan voting atau berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. (Suryanto, 2022)

Pelaksanaan otonomi daerah, secara empiris membawa perubahan dan inovasi dari sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang berfungsi sebagai pengayom, pelayan dan pembina. Pergerakan partisipasi masyarakat dan sub-sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional, sehingga kelurahan/desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat setempat (Lukmanul Hakim, S.Ag, 2017)

Desa sebagai salah satu satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukim dalam suatu daerah tertentu. Desa mempunyai kewenangan yang cukup luas dan menjaditempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab keperluan seluruh masyarakat setempat. Desa memiliki hak melakukan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa tentang pelaksanaan

pembangunan yang ada di setiap desa (Samaun et al., 2022)

Sesuai dengan hal tersebut diatas, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan kerjasama yang baik untuk memajukan daerahnya. Namun pada kenyataannya, masyarakat sering kali merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup pengaruh dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, yang dapat mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (2003:60), metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini adalah gambaran bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa Tembung, Percut Sei Tuan. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, karena fokus penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) atau sering disebut metode etnographi (Sugiyono, 2012:8)

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225)
2. Data Sekunder, adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti seperti dokumen, buku, artikel. (Sugiyono, 2012:226) (Lukmanul Hakim, S.Ag, 2017)

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa metode yang akan diuraikan sebagai berikut: Metode observasi merupakan teknik awal yang di gunakan dalam prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran umum terhadap obyek serta lokasi penelitian. Dimana observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang akan diteliti sambil berperan serta dalam aktivitasnya (Moleong, 2011: 135). Dalam kegiatan observasi, hal-hal yang diamati diantaranya: masyarakat dan keadaan desa.

Wawancara dalam peneliti ini adalah untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian. Di mana metode wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk diperlukan dalam melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data, dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini obyek penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat di Desa Tembung. Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Iman Gunawan, 2013: 178).

Model analisis data di gunakan peneliti adalah model interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus. Teknik yang bersifat kualitatif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Ahmad Tanzeh, 2009:57)(Samaun et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa Tembung, Percut Sei Tuan, mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan lokal. Desa Tembung, yang terletak di Percut Sei Tuan, diyakini memiliki dinamika sendiri dalam melibatkan masyarakatnya dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, rapat-rapat desa menjadi wadah utama di mana partisipasi masyarakat terjadi. Dalam pertemuan ini, warga desa Tembung dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mendiskusikan isu-isu krusial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Keputusan-keputusan strategis, seperti alokasi anggaran dan prioritas pembangunan, seringkali dibahas bersama seluruh masyarakat yang hadir dalam rapat desa.

Selain itu, mekanisme partisipasi masyarakat melibatkan pemanfaatan musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum yang lebih luas di mana perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat dapat bersuara. Melalui musyawarah ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, serta memberikan saran terkait kebijakan dan program pembangunan desa. Pentingnya partisipasi masyarakat terlihat pula dalam proses pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu momen puncak partisipasi politik warga desa. Dalam proses ini, masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sehingga mereka dapat secara langsung menentukan pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan memajukan kepentingan bersama.

Selain forum formal, media sosial dan kelompok-kelompok diskusi masyarakat juga berperan dalam memperluas partisipasi. Diskusi online, pertemuan kelompok kecil, atau kegiatan sosial di luar pertemuan resmi dapat menjadi platform bagi masyarakat desa untuk berbagi pandangan, menciptakan gagasan baru, dan bersama-sama mengambil keputusan terkait perkembangan desa. Namun, meskipun partisipasi masyarakat di desa Tembung tampak aktif, tantangan seperti ketidaksetaraan partisipasi antar kelompok masyarakat dan perubahan dinamika sosial ekonomi dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan. Oleh karena itu, perlu terus mendorong dialog terbuka, mendukung inklusivitas, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam pembangunan desa mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Tembung, Percut Sei Tuan, tidak hanya terbatas pada ranah politik, tetapi juga melibatkan berbagai bidang kehidupan desa, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam beberapa bidang tersebut:

1. Bidang Ekonomi

Pengembangan Usaha Lokal: Masyarakat Desa Tembung mungkin aktif terlibat dalam pengembangan usaha lokal. Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi desa, seperti pembuatan kerajinan tangan, pertanian, atau peternakan, dapat melibatkan warga secara aktif.

Koperasi dan Keuangan: Warga desa dapat bersama-sama mendirikan koperasi atau lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya finansial. Keputusan terkait manajemen koperasi dan penggunaan dana dapat melibatkan partisipasi aktif dari anggota koperasi.

2. Bidang Sosial

Pendidikan: Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan dapat tercermin dalam forum seperti pertemuan orangtua guru, musyawarah sekolah, atau komite sekolah. Warga dapat berkontribusi pada perencanaan kurikulum dan menyoroti kebutuhan pendidikan khusus di desa.

Kesehatan: Dalam masalah kesehatan, partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui kampanye kesehatan masyarakat, program imunisasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan fasilitas kesehatan atau penanganan wabah penyakit.

3. Bidang Lingkungan

Pengelolaan Sumber Daya Alam: Masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah. Partisipasi dalam program penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau pengembangan energi terbarukan dapat menjadi langkah nyata dalam pelestarian lingkungan.

Perubahan Iklim: Partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat tercermin dalam rencana tata ruang yang berkelanjutan, pengurangan emisi, atau peningkatan ketahanan terhadap bencana alam.

4. Bidang Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur: Warga desa dapat memberikan masukan terkait prioritas pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sumber air bersih. Partisipasi dalam proyek-proyek ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Bidang Kesejahteraan Sosial

Program Sosial: Partisipasi masyarakat dalam program-program sosial seperti bantuan sosial, perlindungan anak, atau perawatan lanjut usia dapat mencerminkan kepedulian dan keterlibatan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

Partisipasi masyarakat yang melibatkan berbagai bidang ini memperkuat konsep pembangunan partisipatif, di mana kebijakan dan program dikembangkan dengan melibatkan perspektif dan kebutuhan nyata masyarakat setempat. Dengan demikian, Desa Tembung dapat membangun keberlanjutan yang lebih kokoh melalui keterlibatan aktif warganya dalam berbagai aspek kehidupan desa.

Pembahasan

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik dan pengambilan keputusan di suatu negara atau komunitas. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, baik dalam konteks pemilihan umum, proses legislasi, atau berbagai kegiatan politik lainnya. Desa Tembung, Percut Sei Tuan, suasana gotong-royong dan musyawarah terasa begitu kental. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi pemandangan sehari-hari yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetiakawanan.

Rapat desa menjadi jantung dari partisipasi masyarakat. Setiap bulan, warga Desa Tembung berkumpul di balai desa untuk membahas isu-isu penting yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Pada pertemuan ini, tak hanya para tokoh masyarakat yang memiliki kesempatan berbicara, tetapi setiap warga diberikan hak untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan ide-ide mereka. Suasana demokratis terasa kuat, dan keputusan-keputusan strategis seperti alokasi anggaran dan proyek pembangunan desa dibahas secara terbuka. Musyawarah desa menjadi arena yang lebih luas di mana wakil dari berbagai kelompok masyarakat hadir untuk memberikan suara mereka. Para petani, pengusaha kecil, pemuda, dan kaum perempuan bersama-sama duduk untuk membahas arah pembangunan desa. Disinilah warga dapat secara langsung berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka.

Pemilihan kepala desa menjadi momen penting yang memperkuat partisipasi politik masyarakat. Sebelum pemilihan, debat publik dan diskusi merajalela di warung-warung kopi dan pertemuan kelompok kecil. Setiap calon harus merangkul aspirasi masyarakat dan menjelaskan visi mereka untuk Desa Tembung. Pemilihan dilakukan secara demokratis, dan hasilnya menjadi cermin dari keinginan mayoritas warga. Selain forum-formal, peran media sosial dan kelompok-kelompok kecil turut membentuk pola partisipasi masyarakat. Grup diskusi online di platform media sosial menjadi tempat di mana ide-ide baru dipertukarkan, dan warga dapat memberikan masukan kapan pun dan di mana pun mereka berada. Kelompok-kelompok kecil seperti kelompok peternak atau kelompok perempuan mungkin memiliki pertemuan khusus untuk membahas kebutuhan mereka dan memberikan masukan lebih spesifik.

Namun, tantangan tetap ada. Ketidaksetaraan partisipasi antar kelompok dan perubahan dinamika sosial ekonomi menjadi cobaan yang harus diatasi bersama. Dengan semangat gotong-royong dan komitmen untuk membangun desa yang lebih baik, warga Desa Tembung terus berjuang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjadikan desa mereka sebagai tempat yang inklusif dan berdaya. Melalui partisipasi aktif ini, Desa Tembung terus tumbuh dan berkembang, mengukir jejak cerita keberlanjutan yang penuh harapan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tembung, Percut Sei Tuan, merupakan konsep yang bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks ini, masyarakat desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Beberapa prinsip dasar dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan meliputi: Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, Keterlibatan penuh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Keterbukaan dan transparansi dalam penyampaian informasi, Pemerataan keuntungan dan kerugian dari keputusan yang diambil, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memiliki manfaat signifikan, seperti Peningkatan kualitas pembangunan desa, Penguatan kepemilikan masyarakat terhadap program Pembangunan, Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, Peningkatan kebersamaan dan solidaritas antara pemerintah desa dan masyarakat.

Salah satu contoh desa yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah Desa Bhuana Jaya Jaya di Desa Bhuana Jaya Jaya, yang terletak di kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini telah berhasil melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga dianggap sebagai keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam proses pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berhasil dan berkelanjutan.

Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi dan pemerintahan yang berkelanjutan. Dalam Indonesia, partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seakan partisipasi politik masyarakat, seperti kekhawatiran politik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, dan kurangnya akses informasi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hal ini masih memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, konflik internal partai politik dan kemudahan politisi yang banyak berkonflik dengan politisi lain yang berbeda partai dapat menimbulkan anti-pati masyarakat terhadap partai politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan partai politik untuk melakukan akses-akses dan dialogik dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mencapai tingkat demokrasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi dan pemerintahan yang berkelanjutan. Dalam Indonesia, partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seakan partisipasi politik masyarakat, seperti kekhawatiran politik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, dan kurangnya akses informasi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hal ini masih memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, konflik internal partai politik dan kemudahan politisi yang banyak berkonflik dengan politisi lain yang berbeda partai dapat menimbulkan anti-pati masyarakat terhadap partai politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan partai politik untuk melakukan akses-akses dan dialogik dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mencapai tingkat demokrasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- K. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 369–396. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>
- A. Zaini Bisri. (2012). Partisipasi politik dalam keterbukaan informasi publik. *Politika*, 3(1), 5–6.
- Hariyanto, S. (2013). Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2013. *Aspirasi, Jurnal S1 Ilmu Politik*, 1(25), 1–16.
- JOORIE.M.RURU, D. K., & ROMPAS, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Diradimalata. *Journal-Unsrat*, 2(1), 14–24.
- Lukmanul Hakim, S.Ag, M. S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikum Indonesiana*, 2(2), 43–53.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *HULONDALO. JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI*, 1(1), 18–33.
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i3.374>
- Suryanto, S. D. (2022). Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan pada Pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah. *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5(1), 86–103.
- Yulieth-Rafael, 2020. (2020). Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (Studi Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(2), 1–7.